

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Upaya mewujudkan *good governance* dapat dilihat dari kesiapan pemerintah dengan menyelenggarakan pemerintahan daerah yang berkualitas. Hal ini tercermin dalam transparansi, kekuatan penegak hukum, dan respon pemerintah menanggapi sebuah permasalahan yang terjadi dalam tata kelola pemerintah. Dalam tata pemerintahan yang baik, negara memiliki peran melayani kepentingan rakyat melalui sistem peradilan yang baik dan sistem pemerintahan yang akuntabel, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terselenggara secara efisien dan efektif.

Menurut Rahman dan Rachman (2021), tata kelola pemerintahan yang efektif adalah sistem yang dapat diukur terhadap kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Keberhasilan pemerintah biasanya dapat diukur dari segi keterbukaan, akuntabilitas, daya tanggap, efisiensi, dan kapasitas warga negara untuk menentukan bagaimana anggaran mereka dibelanjakan. Kinerja organisasi, khususnya di mata publik, dapat dipengaruhi baik oleh tata kelola yang baik maupun pengendalian internal. Untuk mencegah kehilangan atau kerusakan aset organisasi dan memastikan integritas data keuangan, pengendalian internal diberlakukan.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah melaksanakan penyempurnaan untuk mencapai *good governance*. Mereka melakukan segala upaya untuk memastikan bahwa daerah menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dengan baik. Tata pemerintahan yang baik berarti kinerja pemerintah yang baik. Hal tersebut didukung oleh studi yang dilaksanakan oleh Jatmiko & Gusmayanti (2022), Marfiah et al. (2021), Makatita et al. (2022), Supriaddin et al. (2022), dan Wiantara & Yadnyana (2020) bahwa variabel *good governance* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Sunarmo et al. (2018) bahwa variabel *good governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, sistem pengendalian internal didefinisikan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Adanya sistem pengendalian internal pada kinerja pemerintah untuk mempertanggung jawabkan tindakan yang diambil untuk memastikan keberhasilan proses integrasi secara keseluruhan (Heluka et al., 2022). Pernyataan di atas didukung oleh penelitian Mattoasi et al. (2021), menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki dampak yang positif terhadap kinerja instansi. Tetapi pada

penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko & Gusmayanti (2022) dan Sutirah (2018) sistem pengendalian internal tidak memiliki dampak terhadap kinerja pemerintah. Pemerintah berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya sehingga operasi, laporan keuangan, properti, dan karyawannya semuanya memenuhi persyaratan hukum. Masyarakat mengharapkan sistem pengendalian internal dapat memastikan bahwa tindakan pegawai negeri konsisten dengan tugasnya.

Menurut Utama (2020), kinerja pemerintah daerah diartikan sebagai efektivitas pemerintah daerah yang diukur dari seberapa baik pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan yang tertuang dalam renstra organisasi. Kinerja menggambarkan sejauh mana rencana strategis diimplementasikan dengan sukses, termasuk tujuan, sasaran, misi, dan visi organisasi (Claudia, 2020). Di sektor publik, kinerja dapat dievaluasi melalui interaksi antara berbagai departemen pemerintah, khususnya di tingkat kotamadya (kota). Mencapai sesuatu secara konsisten, menetapkan dan mencapai tujuan, serta mengarahkan standar kinerja organisasi dan personel ke arah yang positif adalah semua aspek efektivitas organisasi, seperti dijelaskan di dalam Surat as-Saff ayat 4 ;

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَتْهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُورٌ

Artinya; “Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.”

Kebaharuan penelitian ini dengan adanya penambahan variabel independen yaitu partisipasi penyusunan anggaran dan variabel moderasi yaitu gaya kepemimpinan. Dalam penelitian Candra et al. (2019), partisipasi penyusunan anggaran merupakan suatu prosedur dalam pengambilan keputusan serta penyusunan anggaran yang melibatkan banyak pihak secara langsung. Dalam penelitian Aulad et al. (2018), anggaran harus sejalan terhadap kondisi yang muncul di lapangan, maka partisipasi dalam penyusunan anggaran melibatkan upaya atau gagasan tambahan dari berbagai pemangku kepentingan. Penelitian ini sejalan dengan Setyaningtyas dan Sinarasri (2018) bahwa partisipasi penyusunan anggaran dapat mempengaruhi positif terhadap kinerja pemerintah dan Wulandari & Handayani (2018) bahwa gaya kepemimpinan dapat memoderasi positif hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah, namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tahar & Kuncahyo (2020) bahwa partisipasi penyusunan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah dan pada penelitian Candra et al. (2019) bahwa gaya kepemimpinan tidak dapat memoderasi hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah.

Jamirtko & Gusmayanti (2022) menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan adalah tingkah laku seseorang yang dilakukan oleh seorang manajer untuk mempengaruhi bawahannya. Gaya kepemimpinan juga merupakan perwujudan dari perilaku seorang pemimpin tentang

kepemimpinan, yang mewakili keterampilan dan firasat seorang pemimpin. Pemimpin akan menunjukkan gaya kepemimpinannya dalam suatu instansi melalui sikap, tutur kata, dan perilaku. Seorang pemimpin merupakan penentu berhasil tidaknya suatu pemerintahan. Oleh karena itu, seorang pemimpin dapat memengaruhi kinerja organisasi secara signifikan, dan diperlukan gaya kepemimpinan yang baik untuk mendapatkan kinerja yang baik. Penelitian ini sejalan dengan Makatita et al. (2022) bahwa gaya kepemimpinan dapat memperkuat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah dan Supriaddin et al. (2022) bahwa gaya kepemimpinan dapat memperkuat pengaruh *good governance* terhadap kinerja pemerintah. Tapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Supriaddin et al. (2022) bahwa gaya kepemimpinan tidak dapat memperkuat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah dan Makatita et al. (2022) bahwa gaya kepemimpinan tidak dapat memperkuat pengaruh *good governance* terhadap kinerja pemerintah

Menurut Nurbaeti dan Nugraha (2019), pemerintah daerah sebagai entitas terkait di sektor publik, memiliki kewajiban khusus untuk memprioritaskan kebutuhan penduduknya dan melakukannya dengan cara yang ramah lingkungan, sambil membagi pekerjaan mereka dengan tepat dan memberikan layanan terbaik yang layak disertai akuntabilitas dan rasa tanggung jawab dari pihak pemerintah. Pemantauan, analisis, dan pelaporan secara berkala diperlukan untuk memfasilitasi peningkatan

administrasi kota, pengawasan, daya tanggap, profesionalisme, efisiensi, efektivitas, keterbukaan, penegakan kesetaraan kesempatan, sikap, dukungan dan keterlibatan publik, serta fasilitasi tata kelola pemerintahan yang baik penegakan hukum. Perbaikan ini diperlukan untuk membuat kota lebih layak huni. Upaya tersebut juga sesuai dengan tujuan penguatan pelayanan publik yang dituangkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 untuk itu dilakukan. Undang-undang No 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6 menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan yang dimiliki oleh daerah untuk mengatur dan mengurus rakyatnya dan pemerintah sesuai dengan keinginannya sendiri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu pelaksanaan otonomi daerah perlu lebih banyak dibantu oleh banyak komponen masyarakat, seperti menyiapkan kinerja pemerintah daerah dan meningkatkan akuntabilitas melalui pelaporan. Kualitas pelayanan publik ditentukan oleh orang yang menyediakannya dan peralatan yang mereka gunakan. Oleh karena itu, kualitas alat dan aparat sangat berpengaruh terhadap kinerja pelayanan publik yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini disebabkan kualitas peralatan dan aparat secara langsung mempengaruhi bagaimana pelayanan diberikan. Lembaga negara membantu mewujudkan tatanan nasional yang berkualitas untuk kepentingan umum melalui pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia peralatan di pelayanan publik masih membatasi penempatan

peralatan, meskipun sangat dipengaruhi oleh kemampuan peralatan sehingga menghambat kinerja peralatan.

Secara umum dalam mengukur kinerja dapat dilihat dari target kinerja berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dan akan dibandingkan hasil capaian pada kinerja tahun sebelumnya. Pengukuran kinerja yang digunakan adalah capaian kinerja makro yang mana capaian kinerja digambarkan keberhasilannya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah secara umum (Harianjogja.com).

**Tabel 1. 1**  
**Capaian Kinerja Makro**

<b>Indikator Kinerja Makro</b>	<b>Capaian Kinerja Tahun 2020</b>	<b>Capaian Kinerja Tahun 2021</b>	<b>Laju Kinerja (%)</b>
Indeks Pembangunan Manusia	80,01	80,28	0,337 %
Angka Kemiskinan	13.5	14.04	3,85 %
Angka Pengangguran	4.06	4.04	-0,493 %
Pertumbuhan Ekonomi	-1.66	4.97	399,398 %
Pendapatan per Kapita (PDRB per Kapita ADHB)	26.538.959,39	28.128.898,40	5.99%
Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,418	0,441	5.50%

Sumber:Harianjogja.com

Berdasarkan Tabel 1.1 bahwa secara umum pemerintah daerah Bantul dari tahun 2020 ke tahun 2021 telah menghasilkan capaian kinerja yang meningkat atas sasaran strategisnya. Target indikator yang capaian

kinerja meningkat secara baik dan memengaruhi secara positif pada kinerja ada 3 yaitu indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan per-kapita. Untuk indikator angka pengangguran mengalami penurunan sebesar 0,2% yang berarti indikator tersebut memiliki dampak positif terhadap kinerja pemerintah namun tidak terlalu signifikan. Lalu ada indikator angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan yang mengalami peningkatan capaian kinerja dibanding tahun sebelumnya yang mengakibatkan dampak negatif terhadap capaian kinerja, yang berarti pemerintah Bantul tidak berhasil menekan angka kemiskinan serta ketimpangan pendapat pada masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Bantul belum optimal yang berkaitan dengan hasil atau *outcome*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berikut merupakan rumusan masalah terkait dengan latar belakang diatas:

1. Apakah *good governance* berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah?
3. Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah?
4. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh kuat positif dalam penerapan *good governance* terhadap kinerja pemerintah daerah?

5. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh kuat positif dalam sistem pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah daerah?
6. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh kuat positif dalam partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah?

### C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dilakukannya penelitian ini:

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh *good governance* terhadap kinerja pemerintah daerah.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah daerah.
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah.
4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris bahwa gaya kepemimpinan dapat memoderasi hubungan antara *good governance* terhadap kinerja pemerintah daerah.
5. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris bahwa gaya kepemimpinan dapat memoderasi hubungan antara sistem pengendalian internal terhadap kinerja pemerintah daerah.
6. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris bahwa gaya kepemimpinan dapat memoderasi hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah.

#### **D. Manfaat**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membekali para pembaca, termasuk mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan mengenai pengaruh penerapan *good governance*, sistem pengendalian internal, dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten Bantul dengan gaya kepemimpinan sebagai variabel moderasi dan bisa jadi bahan referensi selanjutnya untuk perkembangan penelitian

##### 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah wawasan serta pengembangan dalam memperbaiki kinerja pemerintah.